Penerapan Prinsip Pasar Modal Syariah yang Terindeks Di Lebaga Otoritas Jasa Keuangan Indonesia

Muhammad Isa*, Bunga Sari *

Abstract

This research has purposes to analysts the implementation of Financial Service Authority Regulation No.15/POJK.05/2015 About Applying Sharia Orientation in Stock Market. Another purpose is to found positive effects of applying its rule.

This research is using qualitative method with descriptive approach and takes two months to do the research. This research uses Financial Service Authority Regulation No.15/POJK.05/2015 About Applying Sharia Orientation in Stock Market along with other supporting regulations as samples. This research has the result that the samples are in line with the orientation of sharia in Islam, but on the other hand there are still some obstacles in some aspects of the overall application.

Keywords : *Regulation analysis, regulation implementation, FSA Regulations, Sharia orientation application.*

* Dosen HES IAI Takia

Latar Belakang

Investasi merupakan salah satu instrumen yang sangat penting bagi perkembangan ekonomi. Investasi menjadi instrumen yang tidak pernah luput dan perhatian setiap negara, terutama bagi negara berkembang, salah satunya Indonesia. Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa akan datang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan (KBBI, 2003). Dalam Kamus Hukum Ekonomi, kata investasi adalah penanaman modal yang biasanya dilakukan untuk jangka panjang seperti pengadaan aktiva tetap perusahaan atau membeli sekuritas dengan maksud untuk memperoleh keuntungan (Kamus Istilah Ekonomi Populer, 2003). Sehingga dapat disimpulkan, bahwa investasi adalah keikutsertaan modal dalam pengembangan perusahaan atau proyek dengan tujuan mendapatkan pembagian laba (Tandelilin, Eduardus. 2001). Investasi juga dapat didefinisikan sebagai penukaran uang dengan bentuk kekayaan lain yang diharapkan dapat ditahan selama periode tertentu agar menghasilkan pendapatan.

Investasi secara umum dibagi menjadi dua kelompok, yaitu investasi berbasis riil dan investasi berbasis keuangan. Investasi pada basis riil contohnya adalah investasi emas, tanah, bangunan, dan pembukaan perkebunan. Sementara investasi pada basis keuangan contohnya adalah investasi yang dilakukan di pasar uang maupun pasar modal (Juhaya. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*). Pasar modal adalah salah satu instrumen keuangan yang memperjualbelikan surat-surat berharga seperti obligasi

atau saham untuk jangka panjang. Kegiatan di pasar modal berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek (BAPEPAM, 2010).

Pasar modal merupakan tonggak penting dalam perekonomian dunia saat ini. Banyak industri dan perusahaan yang menggunakan institusi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal memiliki peran yang besar bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi sekaligus, yaitu fungsi ekonomi karena pasar menyediakan fasilitas yang mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana (investor) dan yang memerlukan dana (issuer). Dengan adanya pasar modal maka pihak yang mempunyai kelebihan dana dapat menginvestasikan dana tersebut dengan harapan memperoleh imbalan, sedangkan pihak yang mengalami kekurangan dana dapat terus menjalankan usahanya dengan dana yang diinvestasikan oleh pihak yang kelebihan dana.

Keberadaan pasar modal di Indonesia bukanlah merupakan hal yang baru dalam dunia perekonomian negara. Indonesia berhasil meraih peringkat pertama sebagai negara dengan *return* terbesar di dunia dengan angka mencapai 317%. Saat ini, nilai total kapitalisasi pasar Bursa Efek Indonesia adalah 6400 Triliun dari 555 jumlah keseluruhan perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (IDX, 2016). Saat ini, jumlah investor di Indonesia mencapai lebih dari 586.000 investor, baik dari dalam maupun luar negeri, dengan komposisi dana investasi mayoritasnya yang masih dikuasai oleh investor luar negeri. Indonesia yang memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam, menjadikan berbagai kegiatan ekonomi seharusnya berjalan secara syariah, termasuk dalam transaksi saham di pasar modal Indonesia. Besarnya jumlah penduduk muslim di Indonesia,

sangat menarik minat investor dari dalam dan luar negeri untuk mengembangkan perbankan dan saham berbasis syariah di Indonesia.

Lembaga yang berkontribusi dalam keuangan berbasis syariah di Indonesia adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN-MUI begitu rutin memeriksa dan mengawasi sistem yang berlaku di berbagai lapisan keuangan syariah Indonesia. Demi kelancaran penerapan transaksi berbasis syariah dalam bidang pasar modal, DSN-MUI bekerjasama dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mengawasi dan membuat regulasi terkait pasar modal syariah. Pada sistem transaksi berbasis syariah, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi agar saham dapat dinyatakan sebagai efek syariah. Persyaratan yang dimaksud adalah yang tertulis dalam regulasi yang telah dipublikasikan oleh OJK.

Selain membuat regulasi, OJK melakukan pengawasan secara langsung agar sistem yang berjalan tidak melenceng dari regulasi yang telah dibuat.

Pengawasan dilakukan secara berkala dan teratur sehingga dapat menjamin keamanan lembaga keuangan dan lembaga keuangan syariah berjalan secara aman. OJK membuat regulasi khusus terkait lembaga keuangan syariah. Dua regulasi tersebut yang ditetapkan sesuai kondisi bidang masing-masing, berpotensi memiliki suatu permasalahan yang menarik untuk dibahas. Regulasi dapat memiliki sebab akibat dan batas waktu dalam penerapannya.

Maka, tujuan penelitian kali ini adalah untuk mengetahui sistem penerapan suatu regulasi dan dampak positif dari suatu regulasi. Penelitian kali ini menjadikan POJK No. 15/POJK.04/2014 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal sebagai pembahasan mengingat regulasi tersebut merupakan satu dari beberapa regulasi utama terkait pasar modal syariah. Dengan melakukan pengkajian regulasi, diharapkan kita dapat menemukan sisi kelemahan dari regulasi agar dapat diperbaharui sesuai dengan kondisi terkait. Adapun jika tidak ditemukan ketidaksempurnaan

dari regulasi, diharapkan regulasi dapat terus diterapkan sesuai kondisi yang ada. Harapannya agar sistem lembaga keuangan Indonesia dapat bersaing dan menjadi pedoman bagi pasar modal syariah tingkat dunia.

Berdasarkan latar belakang diatas maka menarik untuk dikaji lebih mendalam:

1. Bagaimana implementasi dari POJK No.15/POJK/04/2014 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal?
2. Bagaimana dampak positif dari penerapan POJK No.15/POJK/04/2014 tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal?

B. Metode Pembahasan

1. Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan menggali atau membangun satu proporsi atau menjelaskan makna di balik realita. Peneliti berpijak dari realita atau peristiwa yang berlangsung di lapangan. Penelitian metode kualitatif dapat diartikan sebagai penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif, mengenai kata-kata lisan maupun tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Penelitian kualitatif juga merupakan penelitian yang menghasilkan deskripsi berupa kata-kata atau lisan dari fenomena yang diteliti atau dari orang-orang yang berkompeten di bidangnya. Melalui penelitian kualitatif ini analisis yang digunakan yaitu deskriptif. Data deskriptif mengandaikan bahwa data tersebut berupa teks. Deskriptif kualitatif adalah penggambaran secara kualitatif fakta, data atau objek material yang bukan berupa rangkaian angka, melainkan berupa bahasa atau wacana (apapun itu bentuknya) melalui interpretasi yang tepat dan sistematis (Moeloeng, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*).

2. Waktu Penelitian

Penelitian tentang ini memakan waktu selama kurang lebih dua bulan waktu penelitian, yaitu dari pertengahan bulan Juni hingga pertengahan bulan Agustus.

3. Jenis Data

3.1 Data Sekunder

Data sekunder merupakan data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh dengan cara membaca, melihat atau mendengarkannya (Moeloeng, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*). Dalam penelitian ini, akan memperoleh data berupa Peraturan Pemerintah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan beserta buku-buku, penelitian jurnal dan informasi internet.

Teknik Pengumpulan Data

4.1 Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian yang dilakukan yaitu membaca literatur yang tersedia di perpustakaan, seperti buku-buku, internet, artikel, dan bahan bacaan lainnya yang mendukung serta berkaitan dengan penelitian ini.

4.2 Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Adapun penelitian lapangan yang dilakukan yaitu dengan cara melakukan observasi ke tempat penelitian, sehingga didapatkan informasi langsung mengenai peraturan pemerintah tentang penelitian terkait. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan (Metode Penelitian Kualitatif, 2012). Hasilnya digunakan sebagai sumber data dalam penelitian ini.

5. Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penelitian ini adalah peraturan dari pemerintah terkait penerapan prinsip syariah di pasar modal Indonesia. Oleh karena itu, populasi dalam penelitian ini adalah regulasi terkait saham syariah di Indonesia. Sampel ditentukan dengan kriteria-kriteria tertentu. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2015 terkait Penerapan Prinsip Syariah.
2. Peraturan pendukung lainnya.

6. Teknik Analisis Data

Data atau informasi yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif dengan pendekatan yang bersifat deskriptif yaitu metode untuk memberikan pemecahan masalah dengan mengumpulkan data, mengklarifikasi, menganalisis dan menginterpretasikannya. Tujuan dari penelitian deskriptif kualitatif searah dengan rumusan masalah serta pertanyaan penelitian atau identifikasi masalah. Hal ini disebabkan tujuan dari penelitian ini akan menjawab pertanyaan sebelumnya yang dikemukakan oleh rumusan masalah.

Setelah keabsahan data telah terpenuhi, selanjutnya melakukan analisis data. Analisis data dilakukan dengan cara:

- a. Pengumpulan data. Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti wawancara, penelitian kepustakaan, dokumentasi, dan sebagainya. Hal pertama yang harus dilakukan adalah dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Data yang dimaksud adalah berupa penelitian-penelitian terdahulu, nash-nash otentik seperti Al-Qur'an dan Sunnah, artikel terkait

hukum pasar modal dan pasar modal syariah, serta regulasi terkait pasar modal dan pasar modal syariah.

b. Reduksi data. Setelah data yang dibutuhkan terkumpul, data-data tersebut kemudian diklarifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan untuk menyesuaikan hasil penelitian.

c. Penyajian data. Data yang sudah dikumpulkan dan diklarifikasikan, kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan sehingga penulis juga dapat menarik kesimpulan atas penganalisisan data. Hasil penelitian berupa pembahasan atas rumusan-rumusan masalah yang dipertanyakan.

d. Kesimpulan atau verifikasi. Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data, yaitu saat kesimpulan yang diperoleh berasal dari hasil pengolahan data menjadi pembahasan terkait rumusan masalah.

C. Pembahasan

1. Implementasi POJK No. 15/POJK/04/2014;

Jika kita membahas lembaga khusus saham syariah di Indonesia, maka lembaga tersebut tidak terlepas dan terpisah dari lembaga pengawas saham di Indonesia karena setiap peraturan saham syariah dipertimbangkan dan diamanatkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dengan melakukan rapat umum dengan Dewan Syariah Nasional terkait hal-hal yang dilarang dalam Islam sehingga terciptalah aturan-aturan saham syariah yang berlaku hingga sekarang. Profesi-profesi terkait saham

syariah seperti Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM) juga tergabung ke dalam lembaga-lembaga pengawasan dari bursa efek Indonesia.

Dalam rangka pengembangan pasar modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan, diperlukan pengembangan infrastruktur pasar modal yang memadai. Salah satu infrastruktur yang penting adalah tersedianya aturan yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan sehingga aturan tersebut dapat diterima pasar modal. Dahulu, di dalam sistem pengaturan dan pengawasan pasar modal syariah, pihak yang berwenang menegakkan peraturan dan melakukan pengawasan tersebut terbagi menjadi dua, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK). Hasil dari perundingan kedua lembaga menghasilkan aturan-aturan yang kemudian menjadi satu kesatuan peraturan pasar modal di Indonesia, termasuk pasar modal syariah. Lalu sejak tahun 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sehubungan dengan pengalihan wewenang, perlu dilakukan penataan kembali struktur peraturan yang ada, terutama yang terkait dengan pasar modal dan pasar modal syariah Indonesia. Penataan kembali dilakukan dengan cara melakukan konversi peraturan dari BAPEPAM-LK menjadi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK). Penataan dilakukan agar terdapat peraturan yang selaras dengan visi dan misi yang ingin dijalankan OJK. Konversi dilakukan sehingga terbentuklah beberapa peraturan terkait saham syariah dari Otoritas Jasa Keuangan. Adapun peraturan-peraturan terkait saham syariah yang dimaksud antara lain:

1. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Peraturan ini menyebutkan tentang efek yang dapat dimuat dalam Daftar Efek Syariah menurut BAPEPAM-LK. Efek tersebut harus merupakan efek yang kegiatan usahanya tidak melanggar prinsip syariah sesuai dengan aturan yang tertulis di peraturan ini. Adapun prinsip syariah yang telah ditentukan merupakan hasil dari kesepakatan DSN-MUI dan OJK perihal pembuatan regulasi terkait.

Peraturan ini juga menyebutkan tentang cara pengelolaan usaha perusahaan bersaham syariah dan sanksi jika terjadi pelanggaran atas peraturan tersebut. Sanksi dapat berupa mencabut persetujuan yang telah diberikan kepada pihak penerbit Daftar Efek Syariah (DES), memerintahkan kepada pihak penerbit Daftar Efek Syariah (DES) untuk mengeluarkan efek yang tidak memenuhi kriteria syariah, serta dapat pula berupa tuntutan pidana.

2. POJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Peraturan ini menyebutkan tentang prinsip syariah dalam pasar modal. Peraturan ini juga menyebutkan kegiatan dan jenis usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah pasar modal. Adapun hal-hal yang bertentangan tersebut telah ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan disepakati oleh pihak Otoritas Jasa Keuangan. Disebutkan pula persyaratan suatu efek dapat menjadi efek syariah dan pihak-pihak yang berwenang melakukan kegiatan syariah di pasar modal.

3. POJK Nomor 16/POJK.04/2015 Tentang Ahli Syariah Pasar Modal (ASPM)

Peraturan ini menjelaskan tentang perizinan dan persyaratan ASPM, tata cara permohonan izin ASPM, masa berlaku eh perpanjangan izin ASPM, tugas, tanggung jawab, dan wewenang ASPM. Adanya pihak berkompeten seperti ASPM ini

dapat membangun kepercayaan pada pasar dalam memberikan nasihat dan pengawasan, sehingga tercipta hubungan pasar efisien dan berkelanjutan dengan tetap memperhatikan sisi syariah setia transaksi.

4. POJK Nomor 17/POJK.04/2015 Tentang tentang Penerbitan dan Persyaratan Efek Syariah Berupa Saham oleh Emiten Syariah atau Perusahaan Publik Syariah

Peraturan ini berisi tentang proses penerbitan efek syariah dan cara pengelolaan usaha yang keduanya tidak lepas diawasi oleh OJK.

5. POJK Nomor 19/POJK.04/2015 Tentang Penerbitan dan Persyaratan Reksa Dana Syariah

Peraturan ini berisi tentang tata cara penerbitan saham reksa dana, baik yang berbentuk perseroan, kontrak investasi kolektif, reksa dana syariah pasar uang, reksa dana syariah pendapatan tetap, reksa dana syariah saham, dan reksa dana syariah campuran. Setiap reksa dana memiliki tata cara pendaftaran yang berbeda sehingga akan dijelaskan mendetail dalam peraturan ini.

6. POJK Nomor 53/POJK.04/2015 Tentang akad yang Digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal

Peraturan ini berisi tentang akad-akad yang terdapat dalam setiap penerbitan efek di pasar modal syariah. Selain itu juga dijelaskan halhal penting dalam setiap akad sehingga akad dapat sah dan terbentuk sempurna.

7. POJK Nomor 61/POJK.04/2016 Tentang Penerapan Prinsip Syariah Di Pasar Modal Pada Manajer Investasi

Peraturan ini berisi tentang cara penerapan prinsip syariah di pasar modal pada manajer investasi. Manajer investasi yang

akan membentuk unit pengelolaan investasi syariah tersebut wajib memiliki dewan pengawas syariah yang memiliki izin ASPM sebagaimana diatur dalam peraturan ini. Juga disebutkan persyaratan dan perizinan kegiatan usaha, ketentuan batas minimum permodalan, fungsi manajer investasi syariah, tata cara pengajuan permohonan izin usaha, dan sistem elektronik perizinan dan pelaporan yang menjadi solusi penyampaian pelaporan kegiatan tahunan manajer investasi syariah agar dapat dilaporkan dengan mudah secara elektronik.

Segala macam bentuk peraturan terkait pasar modal tersebut saling berkait dan memenuhi satu sama lain. Berkenaan dengan terbatasnya waktu penelitian, maka penulis memfokuskan penelitian hanya pada satu peraturan, yaitu Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2014 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Peraturan yang akan dibahas merupakan titik awal perkembangan saham syariah di Indonesia dan menjadi tolak ukur suatu saham dikatakan syariah atau tidak. Setelah dinyatakan syariah, selanjutnya peraturan lain yang akan memberi batasan dan lembaga pemerintahan yang akan melakukan evaluasi rutin dengan berpedoman pada peraturan yang sudah ada.

Dalam rangka pengembangan pasar modal syariah agar dapat tumbuh stabil dan berkelanjutan diperlukan pengembangan infrastruktur pasar yang memadai. Salah satu infrastruktur pasar yang penting adalah tersedianya regulasi yang jelas, mudah dipahami, dan dapat dilaksanakan sehingga regulasi tersebut menjadi regulasi yang dapat diterima pasar (*market friendly*). Dinamika perkembangan pasar modal syariah menuntut adanya penyempurnaan Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan

Efek Syariah, agar sesuai dengan kebutuhan industri Pasar Modal syariah, praktik yang berlaku umum, dan standar internasional.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini menyempurnakan Peraturan Nomor IX.A.13, Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor Kep-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009 tentang Penerbitan Efek Syariah, yang mengatur antara lain penerapan prinsip syariah di pasar modal dalam kegiatan syariah di pasar modal dan/atau kegiatan dan jenis usaha, cara pengelolaan usaha yang dilakukan, serta produk atau jasa yang diterbitkan berdasarkan prinsip syariah. Beberapa pokok penyempurnaan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini antara lain meliputi jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, kewajiban bagi pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal, dan laporan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal. Hal itu terlampir sebagai berikut:

1. Perihal menimbang mengandung urgensi ditetapkannya peraturan otoritas jasa keuangan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Peraturan ini diharapkan mampu menjadi pedoman prinsip syariah dan mendukung perkembangan pasar modal syariah di Indonesia. Peraturan ditetapkan oleh lembaga berwenang yaitu otoritas
2. jasa keuangan yang merupakan lembaga pengawas Lembaga Keuangan Perbankan dan Lembaga Keuangan Non-perbankan di Indonesia.
3. Perihal mengingat menyebutkan peraturan-peraturan yang sebelumnya pernah berfungsi menjadi pedoman pada bidang yang sama. Kemudian seiring menjadi kuatnya keadaan ekonomi

Indonesia dan berkembangnya pasar modal Indonesia, peraturan yang ada disebut kurang mampu mendukung pergerakan pasar modal pada saat itu. Peraturan yang ada diadaptasi menjadi peraturan yang lebih kompleks. Adapun peraturan yang disebutkan di atas menjadi referensi dalam ditetapkannya peraturan ini.

4. Perihal memutuskan menjadi inti dari pedoman yang tertera dalam peraturan ini. Dalam bagian pemutusan, disebutkan tentang ditetapkannya peraturan dari otoritas jasa keuangan tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal yang meliputi jenis kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal, kewajiban bagi pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal, dan laporan pemenuhan prinsip syariah di pasar modal. Adapun pembahasan akan lebih ditekankan pada perihal-perihal yang disebutkan pada kalimat sebelumnya.
5. Pasal (1) berisi tentang definisi atas objek, konsep, dan keadaan yang berkaitan dengan peraturan ini. Definisi memiliki fungsi membatasi objek, konsep, dan keadaan berdasarkan waktu dan tempat suatu kajian serta untuk menyamaratakan persepsi pengguna peraturan satu dengan lainnya terkait hal yang didefinisikan sehingga tidak menyebabkan kesalahpahaman ke depannya.
6. Pasal (2) berisi tentang hal-hal yang dilarang oleh Islam di dalam pasar modal. Pelarangan terbagi menjadi pelarangan usaha/jenis kegiatan dan pelarangan transaksi dalam pasar modal.
 - a. Pelarangan terhadap usaha/jenis kegiatan dalam pasar modal
 1. perjudian dan permainan yang tergolong judi;

2. jasa keuangan ribawi;
 3. jual beli risiko yang mengandung unsur ketidakpastian (*gharar*) dan/atau judi (*maisir*); dan
 4. memproduksi, mendistribusikan, memperdagangkan, dan/atau menyediakan antara lain:
 - a. barang atau jasa haram zatnya (*haram li-dzatihi*);
 - b. barang atau jasa haram bukan karena zatnya (*haram lighairihi*) yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional -
Majelis Ulama Indonesia; dan/atau
 - c. barang atau jasa yang merusak moral dan bersifat mudarat.
- b. Pelarangan terhadap transaksi yang bertentangan dengan prinsip syariah di pasar modal
1. perdagangan atau transaksi dengan penawaran dan/atau permintaan palsu;
 2. perdagangan atau transaksi yang tidak disertai dengan penyerahan barang dan/atau jasa;
 3. perdagangan atas barang yang belum dimiliki;
 4. pembelian atau penjualan atas efek yang menggunakan atau memanfaatkan informasi orang dalam dari emiten atau perusahaan publik;
 5. transaksi marjin atas efek syariah yang mengandung unsur bunga (*riba*);
 6. perdagangan atau transaksi dengan tujuan penimbunan (*ihthikar*);
 7. melakukan perdagangan atau transaksi yang mengandung unsur suap (*risywah*); dan

8. transaksi lain yang mengandung unsur spekulasi (*gharar*), penipuan (*tadlis*) termasuk menyembunyikan kecacatan (*ghisysy*), dan upaya untuk mempengaruhi pihak lain yang mengandung kebohongan (*taghrir*).
7. Pasal (4) menyebutkan tentang pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal, yaitu:
 - a. Pihak yang menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan prinsip syariah di pasar Mmodal.
 - b. Pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan prinsip syariah di pasar modal;
 - c. Pihak yang tidak menyatakan kegiatan dan jenis usaha, dan/atau cara pengelolaannya, dan/atau jasa yang diberikannya berdasarkan prinsip syariah di pasar modal, namun menerbitkan efek syariah dan/atau berperan membantu penerbitan efek syariah di pasar modal.
 8. Pasal (7) menyebutkan tentang kewajiban para pihak yang tertulis dalam Pasal (4) huruf a dalam melakukan kegiatan syariah di pasar modal, yang terdiri dari:
 - a. menyatakan dalam anggaran dasar atau dokumen sejenis bahwa kegiatan usahanya dilakukan berdasarkan prinsip syariah di pasar modal; dan
 - b. mempunyai dewan pengawas syariah.
 9. Pasal (8) menyebutkan tentang kewajiban para pihak yang tertulis dalam Pasal (4) huruf b dalam melakukan kegiatan syariah di pasar modal, yang terdiri dari:

a. mempunyai Dewan Pengawas Syariah, untuk Manajer Investasi

yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah; atau

b. mempunyai Dewan Pengawas Syariah atau paling sedikit 1 (satu) direktur atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh direksi yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, untuk pihak yang melakukan kegiatan selain Manajer Investasi yang mengelola investasi syariah.

10. Pasal (10) dan (11) berisi tentang pemenuhan prinsip syariah di pasar modal, yang memiliki cara-cara sebagai berikut:

(1) Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a wajib menyampaikan laporan yang disusun oleh Dewan Pengawas Syariah kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemenuhan prinsip syariah di pasar modal.

(2) Setiap pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b wajib menyampaikan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait pemenuhan prinsip syariah di pasar modal yang disusun oleh:

a. Dewan Pengawas Syariah, untuk Manajer Investasi yang melakukan kegiatan pengelolaan investasi syariah; atau

b. Dewan Pengawas Syariah, direktur, atau penanggung jawab kegiatan yang diberi mandat oleh direksi, yang memiliki pengetahuan yang memadai dan/atau pengalaman di bidang keuangan syariah, untuk pihak yang melakukan

kegiatan selain manajer investasi yang mengelola investasi syariah.

Pasal 11

(1) Laporan terkait pemenuhan prinsip syariah di pasar modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian laporan tahunan atau laporan keuangan tahunan.

(2) Dalam hal pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai kewajiban menyampaikan lebih dari 1 (satu) laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jatuh waktu kewajiban penyampaian laporan mengikuti kewajiban penyampaian laporan yang paling akhir.

(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hasil revidasi atas pemenuhan prinsip syariah di pasar modal.

11. Pasal (13), (14), dan (15) berisi tentang penjelasan ketentuan sanksi terhadap pelanggaran peraturan saham syariah ini, yang berupa:

(1) Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana di bidang pasar modal, Otoritas Jasa Keuangan berwenang mengenakan sanksi administratif terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini, termasuk pihak-pihak yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut, berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang

tertentu;

- c. pembatasan kegiatan usaha;
- d. pembekuan kegiatan usaha;
- e. pencabutan izin usaha;
- f. pembatalan persetujuan; dan
- g. pembatalan pendaftaran.

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat dikenakan secara tersendiri atau secara bersamaan dengan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

Pasal 1

Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan tertentu terhadap setiap pihak yang melakukan pelanggaran ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 15

Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 kepada masyarakat.

2. Dampak Positif Penerapan POJK No.15/POJK/04/2014

Pesatnya perkembangan ekonomi syariah, menuntut adanya instrumen keuangan sebagai sarana pendukung. Instrumen keuangan

syariah dapat diwujudkan ke dalam berbagai bentuk lembaga pembiayaan seperti halnya lembaga pasar modal syariah. Keberadaan pasar modal syariah diharapkan akan menjadi media alternatif berinvestasi secara halal melalui pembiayaan usaha di sektor riil.

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi syariah, keberadaan investor yang menempatkan dananya di pasar modal syariah perlu mendapatkan perlindungan hukum. Demi memberikan perlindungan kepada investor, sekaligus kepada para pelaku usaha, pemerintah melalui lembaga yang berwenang perlu menciptakan pasar yang kondusif dan efisien melalui proses regulasi yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap berlakunya prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Setiap peraturan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan di Indonesia, pasti memiliki dampak/akibat hukumnya ketika hendak dilakukan tahap pelaksanaan. Akibat hukum dari diberlakukannya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK/04/2014 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu:

- a. Pasar modal menjadi semakin berkembang dengan adanya penambahan

pedoman pasar modal syariah Indonesia

Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan investasi syariah, keberadaan investor yang menempatkan dananya di pasar modal syariah perlu mendapatkan perlindungan hukum. Demi memberikan perlindungan kepada investor, sekaligus kepada para pelaku usaha, pemerintah melalui lembaga yang berwenang perlu menciptakan pasar yang kondusif dan efisien melalui proses regulasi yang memberikan jaminan kepastian hukum terhadap berlakunya prinsip-prinsip syariah di pasar modal. Adanya peraturan dari OJK memberi rasa aman bagi berbagai pihak agar dapat membedakan jenis transaksi yang diperbolehkan dan dilarang dalam Islam.

b. Terdapat sistem pengawasan yang lebih ketat dan lebih kuat Pemerintah bekerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan sehingga membentuk lembaga pengawas khusus yang mengawasi berjalannya transaksi pasar modal syariah. Adanya peraturan pendukung terkait pasar modal syariah akan membentuk lembaga-lembaga pengawas agar sistem operasional pasar modal tidak melenceng dari peraturan yang sesungguhnya.

c. Terdapat sistem penyeleksian saham yang lebih kompleks

Proses seleksi perusahaan untuk menjadi terbuka (TBK) sehingga bisa menawarkan saham, disebut *initial public offering* (IPO). Selama ini, syarat proses IPO yang tersedia hanya memfokuskan pada kestabilan kondisi finansial perusahaan. Perusahaan *startup* bisa IPO selama aset di bawah Rp 50 miliar untuk skala kecil dan perusahaan skala menengah dengan aset Rp 50 miliar hingga Rp 100 miliar. Namun untuk dapat dikategorikan sebagai saham syariah, tentunya perusahaan harus melalui seleksi saham yang lebih ketat. Selain persyaratan jumlah minimum aset, perusahaan juga harus menepati Peraturan OJK No. 15/POJK/04/2014 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal. Pengkategorian saham syariah dan non syariah sebenarnya bukan hal yang diwajibkan bagi perusahaan, hanya saja dengan terdaftar sebagai salah satu emiten saham syariah, perusahaan akan memperluas jaringan investor mereka karena kini para investor tidak perlu mengkhawatirkan kehalalan saham yang ditawarkan.

d. Terbentuknya *index* baru untuk pasar modal syariah

Setelah melalui tahap IPO, perusahaan akan terdaftar di daftar efek saham Indonesia yang disebut Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) atau Jakarta Composite Index (JCI). IHSG menampung semua saham yang telah IPO. IHSG mencatat nilai perusahaan serta proses transaksi saham pada jam perdagangan saham di bursa sedang berlangsung. Kemudian dari 618

saham yang terdaftar saat ini, 45 saham perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas paling baik, akan dimasukkan ke dalam daftar LQ45. Saham yang terdaftar ke dalam LQ45 ini adalah saham yang sudah memiliki pondasi kuat dan memiliki kemampuan mengembalikan modal yang diberikan para investor dengan cepat.

Berbeda apabila saham sudah terdaftar sebagai salah satu saham syariah. Setelah melewati proses seleksi, saham tersebut akan dimasukkan ke dalam Daftar Efek Syariah (DES). Dari total 618 saham, terdapat 351 saham yang dinyatakan sebagai saham syariah dan terdaftar di DES. Artinya sebuah saham bisa terdaftar di IHSG dan DES sekaligus jika memenuhi persyaratan. Lalu dari 351 saham syariah, akan diseleksi kembali 30 saham syariah yang paling baik likuiditasnya. 30 saham tersebut akan terdaftar ke dalam Jakarta Islami Index (JII). Jadi tidak menutup kemungkinan jika sebuah saham akan terdaftar di 4 index sekaligus, yaitu Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), LQ45, Daftar Efek Syariah (DES), dan Jakarta Islamic Index (JII) sebagai salah satu saham syariah. Masalah tidak hanya dari segi jumlah, kemampuan Sumber Daya Manusia menjadi tantangan tersendiri. Tuntutannya adalah membangun sistem pengawasan yang terintegrasi menghadapi konglomerasi sektor jasa keuangan. Sementara, selama ini pengalaman SDM adalah melakukan pengawasan secara sektoral sesuai bidang masing-masing.

e. Knowledge (Pengetahuan)

Pengetahuan yang dimaksudkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang dijadikan sebagai faktor penghambat dari internal ialah kurangnya pengetahuan mengenai sektor jasa keuangan terutama perbankan oleh pegawai Otoritas Jasa Keuangan tersebut. Kurangnya pengetahuan tersebut dapat mengganggu dalam kinerja terutama mewujudkan pengawasan yang terintegrasi.

f. Kurang terintegrasi

Belum terintegrasinya sistem pengawasan sektor perbankan, Industri Keuangan Non Bank (KNB) dengan pengawasan yang masih terpisah-pisah sehingga supervisi tidak terintegrasi. Walaupun supervisi dilaksanakan dengan baik di satu sisi, tetapi belum tentu dilaksanakan dengan baik di sisi yang lain. Hal tersebut berpotensi menimbulkan dampak yang kurang menguntungkan bagi industri keuangan secara keseluruhan terutama apabila terjadi "rouble" di salah satu sektor dalam industri keuangan. Sehingga dibutuhkan pengawasan yang terintegrasi. Hambatan eksternal yang dihadapi OJK ialah kompleksitasnya transaksi yang beragam, cross border, multi produk. Karena banyak kompleksitas dalam kegiatan perbankan maka menjadi penghambat OJK sebagai lembaga pengawas lembaga perbankan khususnya pengawasan transaksinya perbankan yang setiap harinya meningkat. Berdasarkan penelitian terkait, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

- a. Diperlukan penanganan terhadap hambatan dalam pelaksanaan

Hambatan yang masih terdapat dalam transaksi pasar modal diharapkan dapat menjadi evaluasi bagi lembaga berwenang untuk melakukan tindakan preventif agar hambatan tersebut tidak berkelanjutan.

- b. Dibutuhkan peraturan pendukung lainnya sehingga tidak terdapat celah dalam pelaksanaan transaksi yang dilarang

Perkembangan sistem pasar modal yang menjadi lebih baik masih tidak menutupi terjadinya kecurangan-kecurangan dalam transaksi. Maka diperlukan peraturan pendukung lainnya agar sistem pada pasar modal Indonesia menjadi lebih kompleks tanpa celah untuk kecurangan.

D. Daftar Pustaka

Buku

Ali, Zainudin. 2009. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika.

Antonio, M. Syafii. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.

Billah, Mohd Ma'sum. 2010. *Penerapan Pasar Modal Islam.*: Sweet & Maxwell Asia.

Burhanucidin. 2008. *Pasar Modal Syariah: Tinjauan Hukum*. Yogyakarta : UII Press.

Heykal, Mohammad. 2012. *Tuntunan dan Aplikasi Investasi Syariah*. Jakarta : Elex Media Komputindo.

Investasi di Pasar Modal Syariah? Mengapa Tidak? Siregar, Muhammad Ivan Chasera. 2017.

Juhaya. 2012. *Lembaga Keuangan Syariah*. Bandung : CV Pustaka Setia

Keuangan, Otoritas Jasa. 2016. *Perkembangan Pasar Modal Syariah*. Jakarta : Otoritas Jasa Keuangan.

Manan, Abdul. 2009. *Aspek Hukum dalam Penyelenggaraan Investasi di Pasar Modal Syariah Indonesia*. Jakarta : Kencana.

Moeloeng, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Resda Karya.

Soemitra, Andri. 2014. *Masa Depan Pasar Modal Syariah di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group.

Sutedi, Adrian. 2014. *Aspek Hukum Otoritas Jasa Keuangan*. Jakarta : Raih Asa Sukses.

Tandelilin, Eduardus. 2001. *Analisis Investasi dan Manajemen Portofolio*. Yogyakarta.

Jurnal

Asroi, Muh. 2015. *Implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Terhadap Pengaturan Dan Pengawasan Lembaga Perbankan*. Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN).

Emyta, Resha.2014. *Analisis Tugas Peraturan dan Pengawasan Perbankan oleh Otoritas Jasa Keuangan (Perbandingan Antara Jerman, dan Inggris)*. Depok: Universitas Indonesia.

Safitri, Rahma. 2013. *Indepedensi Otoritas Jasa Keuangan dalam Melakukan Pengawasan Perbankan di Indonesia (Berdasarkan Berlakunya Undang- 108 undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan)*. Surakarta: Univ. Sebelas Maret.

Raden, Panji. 2017. *Analisis Yuridis Indepedensi Ojk (Otoritas Jasa Keuangan) Dalam Upaya Pengawasan Bank*. Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Permata Sari, Anggela. 2016. *Implementasi Pojk Nomor 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan Dalam Memberikan Fasilitas Penyelesaian Pengaduan Dan Sengketa Konsumen Oleh Otoritas Jasa Keuangan Sumatera Barat*. Padang: Universitas Andalas.

Peraturan terkait:

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945

POJK Nomor 15/POJK.04/2015 Tentang Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal **Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor KEP-115/BL/2008 Tahun 2008**

Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: KEP-208/BL/2012 Tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah

Internet:

www.idx.co.id

www.ojk.go.id

www.dalamislam.com/hu

[kum-](#)

[islam/ekonomi/hukum-](#)

[jual-beli-saham-dalamislam](#)

www.sahamsyariah.com

www.dsnmui.or.id/

<http://e->

journal.uajy.ac.id/12197/4

[/HK113020.pdf](#)

www.hukumonline.com